

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM ERA GLOBALISASI

Purbayu Budi Santosa

Abstract

Industrialization strategy took by Indonesia, based on high technology and capital intensive had been look as a wrong strategy. It is not appropriate for Indonesia because Indonesian economy is based on the agricultural sector, so industrialization strategy based on high technology and capital intensive created several kinds of inefficiency and resources misallocation. This strategy had created weak structure of Indonesian economy, by which industry sector does not have strong linkages with other sectors, especially agricultural sector.

It should be noted, that later on, industrialization strategy in Indonesia must be based on agricultural sector. The objective of this paper is to explain the strategy of agricultural development in Indonesia. Human resources development in agricultural sector is a key factor in developing agricultural sector. Financial support is look as one of another important strategy also .

Key-words: *Industrialization strategy, high technology, capital intensive, agricultural sector, human resources development and financial support.*

Pendahuluan

Ketika krisis moneter dan ekonomi menerpa Indonesia, kita semua merasakan dahsyatnya krisis tersebut. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis, dan hanya sektor pertanian pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan positif (Purbayu BS, 2002). Sektor pertanian yang biasanya disepelekan dan dianggap berkaitan dengan kemiskinan, keterbelakangan dan kekumuhan, ternyata secara umum tahan terhadap krisis dan dapat sebagai penahan untuk menggeliatkan roda perekonomian kembali.

Seiring dengan berjalannya waktu, multi krisis belum berhasil diatasi, karena terlalu parahnya penyakit yang mengena Indonesia. Segelintir konglomerat yang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia terjerembab jatuh karena usahanya tidaklah efisien dan berlindung di bawah penguasa dan parahnya lagi banyak meninggalkan hutang yang sangat besar. Usaha kecil dan menengah maupun koperasi yang dalam usahanya kurang mendapat perhatian dan berbagai fasilitas, ternyata usahanya relatif eksis dan diharapkan usahanya dapat sebagai motor penggerak roda perekonomian. Memang usaha kecil dan menengah maupun koperasi banyak yang berusaha dalam sektor pertanian maupun yang berkaitan dengan itu, sehingga sangatlah cepat apabila keduanya mendapatkan porsi penting dalam pengembangan ekonomi.

Perkembangan yang menarik di sisi lainnya adalah terlalu besarnya hutang luar negeri Indonesia kepada Bank Dunia dan IMF, yang sebenarnya diharapkan untuk menyembuhkan krisis. Akibat besarnya hutang, maka ketergantungan Indonesia kepada lembaga tersebut sangatlah besar, sehingga yang kelihatan kita hanya membebek kepada kemauan mereka yang terlalu pro pasar. Belum lagi fajar berlakunya perdagangan bebas ataupun globalisasi sudah mulai berlaku dan tambah waktu kelihatannya tambah marak. Terdapat sisi gelap dan terang dalam globalisasi, di mana globalisasi akan membawa pemenang sekaligus pecundang. Sisi gelap dari globalisasi adalah globalisasi sebagai kapitalisme kasino, globalisasi adalah anti negara, globalisasi sebagai kompetisi yang menghancurkan, globalisasi sebagai pembunuh pekerjaan, globalisasi pembunuh kaum miskin, globalisasi sebagai individualisme yang berlebihan, globalisasi sebagai imperialisme budaya dan globalisasi merupakan kompor bagi munculnya gerakan-gerakan neo-nasionalisme serta fundamentalis. Adapun sisi terang globalisasi adalah globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, globalisasi dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani dalam skala global, globalisasi tidak mengurangi ruang gerak pemerintah dalam kebijakan ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, globalisasi tidak berseberangan dengan desentralisasi dan globalisasi bukan penyebab krisis ekonomi (Mahmud Thoha, 2001). Akibat kumulatif sebagai faktor tersebut, maka kran impor beraneka ragam komoditi (sebenarnya juga ekspor) terus membajiri Indonesia. Kaum konsumen yang berduit tentunya merasa senang karena banyaknya barang pilihan, tetapi bagi produsen yang tidak efisien dan kompetitif akan tergusur dari persaingan. Khusus untuk komoditi pertanian dapat kita lihat betapa terpukulnya petani padi, tebu, dan petani lainnya.

Mencermati bahaya globalisasi dan secara khusus tantangan AFTA sudah di depan kita (tahun 2003), maka perlu ditelaah bagaimana kiranya strategi pembangunan pertanian yang kondusif dalam era perdagangan bebas. Tetapi sebelumnya sebagai perbandingan perlu dikemukakan kesalahan pembangunan ekonomi dalam masa lalu (khusus orde baru), sehingga untuk langkah ke depan mestinya kita dapat memetik pelajaran untuk tidak berbuat salah kembali.

Kesalahan Pembangunan Ekonomi dalam Masa Orde Baru

Pembangunan ekonomi selama rezim presiden Suharto secara jujur ditilik dari aspek fiskal sebenarnya cukup baik, akan tetapi dari aspek fundamental perekonomian menghasilkan fondasi yang sangat rapuh. Strategi pembangunan dalam masa itu bertumpu pada Trilogi Pembangunan, masing-masing pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Titik berat dari masing-masing tahapan pembangunan dapat berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi menurut kepentingan petinggi pengambil keijaksanaan. Secara konseptual strategi seperti ini sangatlah baik, tetapi dalam implementasinya banyaklah terjadi kemencengan. Kalau yang dilihat tercapainya stabilitas nasional benar terjadi pada masa Orde Baru, tetapi sifatnya semu, yang berarti sebenarnya kita semua dibuat merasa takut dan tunduk kepada perintah petinggi negara. Karena kita sudah sangat terkekang cukup lama, maka begitu sedikit ada peluang untuk bertindak lain (keran kebebasan), maka akibatnya munculah *euphoria anarkisme*.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi masa itu rata-rata cukup tinggi (6-8%), tetapi apakah disertai dengan pemerataan pendapatan? Memang kalau secara agregat dalam masa-masa tertentu terjadi ke arah pemerataan pendapatan, tetapi secara mikro ataupun sektoral belumlah mesti terjadi. Sebagai misal dalam bidang pertanian ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan lahan pertanian dalam berbagai daerah cukuplah tajam (Angka Gini/AG lebih besar 0,5), sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pendapatan. Penelitian penulis (1997) di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan pemilikan lahan pada musim kemarau dan penghujan cukup timpang (AG masing-masing 0,587 dan 0,586) sedangkan penguasaan lahan mengalami penurunan dalam ketimpangan masing-masing AG-nya 0,452 (musim kemarau) dan 0,449 (musim penghujan).

Penelitian Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tahun 1993 menyebutkan bahwa hanya 3 juta penduduk Indonesia berpendapatan sebesar rata-rata US\$ 20.000 per kapita per tahun. Sementara 20 juta penduduk lainnya berpendapatan US\$ 1.500 per kapita per tahun, kemudian masih ada 140 juta penduduk dengan rata-rata pendapatan US\$ 380 per kapita per tahunnya dan terakhir 27 juta penduduk lagi masih berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita per tahunnya US\$190 saja. Jika dilihat dalam penguasaan aset nasional, maka 80% perekonomian Indonesia hanya dinikmati oleh sekitar 200 glintir konglomerat, sementara yang 20% harus dibagi-bagi oleh 200 juta penduduk lainnya (Abdoel Sjoekoer, 1998).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup besar tersebut dapat terjadi karena modal berasal dari dalam negeri dan luar negeri (salah satunya dari hutang luar negeri). Pertumbuhan dari sektor industri cukuplah besar, di mana untuk tahun 1990 sebesar 11,2%, tahun 1991-1993 antara 9,5-9,7% per tahun dan tahun 1994 dan 1995 sama besar 12,0%. Untuk sektor pertanian pertumbuhannya untuk tahun 1990 dan 1994 sama-sama sebesar 2,7% pertahun, demikian juga untuk tahun 1991 dan 1993 juga sama besar 1,4% per tahun dan pada tahun 1995 sebesar 3,0% per tahun. Perhatikan lampiran 2 yang melukiskan berbagai indikator ekonomi Indonesia, termasuk yang mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor. Menurut Soeharsono Sagir (1997) rendahnya pertumbuhan sektor pertanian tentunya berkaitan dengan rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian. Alokasi kredit untuk sektor pertanian pada tahun 1990 (8,4%), 1991 (7,65%), 1992 (7,69%), 1993 (8,16%), 1994 (8,90%), dan 1995 (7,31%); sedang di lain pihak sektor industri memperoleh alokasi kredit pada tahun 1990 (31,7%), 1991 (31,4%), 1992(30,6%), 1993(35,0%), 1994(33,5%), 1995(31,6%).

Pertumbuhan sektoral yang tinggi pada sektor industri ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja secara berarti, karena tenaga kerja kebanyakan masih berada di sektor pertanian. Dengan demikian sektor industri yang dikembangkan bersifat pada modal, sehingga Tesis Lewis dan Ranis-Fei tidaklah cocok dan tepat diterapkan di Indonesia. Menurut Bungaran Saragih (1998) industri yang diadopsi di Indonesia adalah kombinasi dari pengembangan industri-industri yang berspektrum luas (*broad based industry*), yaitu strategi yang lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (*footlose industry*) yang bersumber dari relokasi industri dan perluasan pasar industri negara lain (seperti industri elektronik, tekstil, otomotif dan lain-lain) dengan industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, persenjataan, kapal dan industri lainnya.

Industri yang diterapkan di Indonesia kebanyakan masih manja meminta perlindungan dari Pemerintah (tentunya dengan balas jasa tertentu), sehingga pasar dalam negeri dapat dikuasai dan secara umum tidak mampu untuk ekspansi ke luar negeri. Kenyataan ini menurut Saragih (1998) didukung oleh kebijaksanaan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (kurs rupiah) dibuat *artificial overvalued axchange rate*. Kebijakan kurs yang demikian mensubsidi kurs untuk impor dan sekaligus menerapkan pajak kurs pada ekspor, sehingga memberi insentif bagi industri yang berbahan impor. Sehingga yang terjadi pada industriawan besar (konglomerat) diuntungkan dengan bahan baku yang diimpor lebih murah dari yang semestinya dan penjualannya kebanyakan untuk pasar dalam negeri, di mana terdapat 200-an juta konsumen. Belum lagi modalnya banyak yang diperoleh dari kredit murah, tetapi keserakahannya banyak yang terjebak karena hutang luar negeri. Orang umum juga tahu bahwa yang menguasai industri hanya beberapa orang konglomerat, di mana orang tersebut kebanyakan warga keturunan maupun pihak-pihak yang dekat petinggi negara. Budaya NKK (penulis lebih senang menyebut istilah ini, karena KKN sebenarnya sebuah istilah yang sangat tepat untuk Kuliah Kerja Nyata yang merupakan tugas luhur dari mahasiswa untuk mengerti dan membantu masyarakat desa. Kenapa sebutan untuk istilah luhur kok jadinya diterapkan untuk istilah yang kurang baik. Sebaliknya NKK sebelumnya merupakan singkatan dari Normalisasi Kehidupan Kampus yang merupakan suatu langkah untuk memberangus kehidupan mahasiswa. Istilah NKK juga lebih tepat, karena dari Nepotisme biasanya menimbulkan kolusi dan pada akhirnya kepada korupsi) ternyata telah menyebabkan biaya ekonomi tinggi, yang sebenarnya menyebabkan lemahnya pondamen perekonomian dan tidak efisiensinya perekonomian nasional.

Perubahan dalam Pola Pembangunan

Strategi pembangunan yang dicanangkan pada rejim Soeharto sebenarnya terlalu meniru pola pembangunan negara-negara maju (industri), yaitu ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana setrategi industrialisasi dikedepankan dan melalui mekanisme *trickle down effect* akan membawa kenaikan pendapatan pada masyarakat lapisan bawah. Dengan kata lain untuk mengejar ketinggalan dari negara maju maka lompatan nilai tambah pendapatan perlulah segera diraih, akan tetapi karena kurangnya pembangunan kelembagaan (*institutional*) yang benar justru pada ujungnya berakibat pada bencana krisis. Melihat ketidakberhasilan setrategi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang berbasis impor, padat modal, berteknologi tinggi dan penuh nuansa kolusi dan korupsi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap strategi pembangunan.

Untuk merealisasikan hal ini tentunya kita harus melihat kepada sebutan negara kita sejak dahulu disebut negara agraris, maka titik tolak pembangunan harus bertumpu kepada pertanian. Pertanian yang diinginkan tentunya pertanian yang kokoh, yang unggul, yang mempunyai tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi dan kompetitif dalam pemasaran. Untuk menghasilkan hal ini tentunya memerlukan penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai disertai pengolahan hasil-hasil pertanian, sehingga pemasarannya menjadi lancar. Dengan kata lain perlulah diwujudkan setrategi pembangunan agribisnis yang terdiri dari sub-sektor penyediaan input, sub-sektor produksi dan sub-sektor output di mana pembangunan

pada masing-masing sub-sektor saling terkait dan terintegrasi. Menurut Saragih (1998) sektor agribisnis, terdiri dari pertama sub-sektor agribisnis hulu (*up-strem agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi (industri, perdagangan) yang menghasilkan sarana produksi (*input*) bagi pertanian primer ; kedua sub-sektor pertanian primer (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan usaha tani yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan produk pertanian primer (sehingga disebut pertanian primer) ; dan ketiga sub-sektor agribisnis hilir (*down-strem agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan (industri hasil pertanian / agroindustri) beserta kegiatan perdagangannya. Adapun menurut Fachrurrozie Sjarkowi (1992) agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yaitu meliputi usaha (produksi dan pemasaran input-pertanian), (usaha tani), serta (usaha pengolahan dan pemasaran hasil-pertanian). Atau secara singkatnya menurut Dumairy (1992), pembangunan pola agribisnis meliputi pembangunan agronomi, agroindustri serta pembangunan agroniaga.

Penerapan setrategi pembangunan pada agribisnis sangatlah tepat mengingat dalam kancan global ternyata agribisnis merupakan industri dunia terbesar (Peter Batt dalam Beddu A, 1997) dan bagi Indonesia juga merupakan mega sektor dalam perekonomian nasional, yaitu melibatkan seluruh wilayah nasional, menyerap sekitar 70 persen usaha kecil-menengah dan koperasi dan menghidupi (sumber) pendapatan hampir 80 persen penduduk Indonesia yang pada saat ini berjumlah 202 juta jiwa (Saragih, 1998). Menurut Soekartawi (1991) agribisnis berprospek cukup cerah di Indonesia karena : (a) letak Indonesia di garis khatulistiwa yang menyebabkan cukupnya sinar matahari; (b) lokasi Indonesia berada di luar zone angin taifun, (c) kecukupan sarana dan prasarananya; dan (d) sektor pertanian sebagai sektor yang mendapat prioritas penting. Meskipun begitu menurut Perhepi (1989 dalam Soekartawi, 1991) hambatan dalam pengembangan agribisnis meliputi berbagai hal, diantaranya : (a) lokasi produksi yang terpecah-pecah; (b) sarana dan prasarana khususnya di luar Jawa masih belum memadai; (c) akibat; (d) menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi; (d) sering dijumpai adanya pemusatan agroindustri yang terpusat di kota-kota besar, sehingga bahan baku pertanian menjadi mahal untuk mencapai lokasi agribisnis tersebut; dan (e) sistem kelembagaan dipedesaan masih lemah.

Berbagai Langkah Strategis dalam Pengembangan Agribisnis

Seperti telah dikemukakan agribisnis sebenarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, masing-masing penyediaan sarana produksi, proses produksi/ menghasilkan produk pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil. Pengembangan agribisnis sebagai upaya untuk memajukan pertanian yang moderen menuju kepada ketangguhan perekonomian Indonesia, memerlukan kemauan politis (*political will*) dari Pemerintah untuk mengerahkan segala sumber daya dan sumber dana yang dapat dimiliki untuk mengembangkan keempat komponen (sub sistem) tersebut. Langkah-langkah setrategis secara garis besar yang perlu dilakukan diantaranya :

a. Pemberdayaan Sumber Manusia Agribisnis

Kondisi sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang pertanian sungguh sangat memprihatinkan. Didin S. Damanhuri (1999) dengan mengutip hasil Sensus Pertanian 1993, menyimpulkan pertama sekitar 88% petani Indonesia hanya memperoleh pendidikan

maksimum tamat SD, bahkan sekitar 15% diantaranya tidak sekolah. Kedua, dengan tingkat pendidikan mayoritas petani yang sangat rendah tersebut mengakibatkan produktivitas SDM yang juga rendah, khususnya dalam menyerap berbagai teknologi, yakni hanya sekitar 0,23%, 0,36% dan 0,39% dibandingkan produktivitas SDM di sektor industri, perdagangan dan rata-rata nasional. Ketiga, kondisi kedua tersebut antara lain disebabkan oleh terdapatnya kecenderungan semakin membengkaknya jumlah petani gurem (pemilik lahan kurang dari 0,5 hektar), yakni dari sekitar 9,5 juta (1983) menjadi sekitar 11 juta orang (1993). Melihat kepada masih rendahnya kondisi SDM yang bergerak dalam bidang agribisnis. Usaha ini dapat dilakukan oleh para penyuluh maupun litbang pertanian dan harus dirubah orientasinya kepada alih teknologi peningkatan produksi. Orientasi penyuluhan haruslah menyeluruh dan terpadu serta berjalan serasi yang menyangkut semua aspek agribisnis, seperti aspek teknis, pemasaran, pembukuan, permodalan, asuransi dan berbagai aspek lainnya. Kemudian dalam mengantisipasi perkembangan global, perlu dilakukan juga penerapan teknologi yang tepat, seperti penerapan bioteknologi, teknologi ecofarming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi informasi (Dillon, 1998). Akan lebih mengena apabila dapat dilakukan kerja sama secara terkoordinasi antara dinas terkait didalam melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian Tim Lemlit Undip (1999) dalam menemukan komoditas unggulan pertanian di Jawa Tengah, koordinasi antar dinas terkait masih kurang dan berbagai pembinaan masihdirasa kurang oleh pengusaha/petani. Pihak Perguruan Tinggi dan LSM yang terkait yang tertarik untuk mengadakan pembinaan dalam rangka ikut membangun agribisnis yang tangguh sangatlah diharapkan; dan untuk kelancaran tugasnya perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan pembinaan.

b. Bantuan Dana Keuangan

Sembuhnya perekonomian nasional dari penyakit yang kronis memang memerlukan obat yang mujarab. Panduan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat disertai terjaminnya keamanan, tentunya merupakan obat yang dipandang cukup manjur. Sekarang ini dimana gejala inflasi mulai mereda, kiranya dapat diambil kebijaksanaan untuk menurunkan suku bunga, supaya sektor riil dapat menggeliat dari kegerahan. Langkah yang perlu diambil untuk mencapai kepada ketangguhan perekonomian Indonesia adalah dengan merealisasikan pembangunan agribisnis, dimana pembangunan kepada subsektor-subsektor yang saling terkait dan terintegrasi baik sektor input, produksi dan output. Bantuan dana demikian diperlukan untuk menggairahkan pengembangan agribisnis di negara kita, di mana diarahkan kepada penggunaan sumber daya (bahan baku) dari dalam negeri. Para pengusaha yang bergerak dalam bidang agribisnis terkadang kesulitan untuk akses ke dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, maka diperlukan persyaratan yang mudah dan tidak berbelit untuk pinjam uang. Dengan adanya berbagai macam bantuan skim kredit untuk mengembangkan sektor pertanian, dapatlah menolong kepada pengusaha yang menggeluti sektor agribisnis. Lihatlah dalam lampiran untuk melihat berbagai jenis skim kredit yang sekarang diadakan pemerintah, yang tentunya dengan tingkat suku bunga rendah. Iklim penanaman modal baik PMA maupun PMDN dalam bidang agribisnis perlu

diberikan berbagai kemudahan. Rangkuti (1992) menyebutkan perlunya diambil berbagai kebijaksanaan dalam bidang pembiayaan untuk mengembangkan agribisnis, diantaranya:

- a. Penyediaan dana pengembangan agribisnis melalui pungutan dalam transaksi perdagangan komoditi pertanian baik domestik maupun melalui ekspor yang peruntukkan dan cara penggunaannya ditetapkan pemerintah secara khusus seperti dana reboisasi di kehutanan;
- b. Penyediaan anggaran pembangunan melalui APBN yang diperlukan dalam jumlah yang memadai untuk kegiatan pengembangan agribisnis;
- c. Pengembangan bank agribisnis dengan persyaratan dan cara kerja khusus yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan sistem kredit program khusus yang ditetapkan Pemerintah.

c. Pola Kemitraan

Pola kemitraan antara para petani/ pengusaha dengan pengusaha menengah dan besar atau pihak lainnya sangatlah diharapkan. Pola kemitraan ini hendaknya dapat saling menguntungkan kepada pihak-pihak yang terkait, dan jangan dilaksanakan karena hanya untuk memenuhi himbauan, yang ternyata sering-sering setengah hati atau justru pihak petani malahan dirugikan. Hasil penelitian Akatiga (1996) kiranya dapat memberikan contoh di mana pola kemitraan justru merugikan pihak petani. Penelitian yang diadakan para PIR pangan (nanas) di daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa penyebab kegagalan pada pihak perusahaan itu ditemukan, seperti kegagalan mendelegasikan proses produksi primer kepada petani plasma, memasok dana, teknologi, dan penyuluhan yang dijanjikan. Petani yang akhirnya tidak dapat menghasilkan buah nanas yang berkualitas, dan tidak dapat menjual hasil-hasil usaha taninya secara terus-menerus/ teratur. Akibatnya petani harus menanggung beban dan mengalami kerugian. Peran koperasi juga sangatlah diperlukan dalam rangka mengembangkan ketahanan sektor pertanian. Koperasi yang diadakan benar-benar menguntungkan para anggotanya, dimana dengan koperasi yang ada dapat dibeli berbagai sarana produksi, menjual hasil produksi dan pinjam dana untuk pengembangan usaha tani. Pengalaman koperasi masa lalu yang kebanyakan hanya menguntungkan para pengurusnya perlulah dibuang jauh-jauh. Koperasi juga sebagai memperkuat posisi petani (*bargaining position*) dalam menjual hasil produk pertaniannya ke pihak lainnya (misal pedagang pengumpul). Dengan demikian ide, visi dan misi koperasi yang sebenarnya perlu direalisasikan sekarang ini.

d. Perwilayahan Komoditis

Pengembangan agribisnis tentunya harus berorientasi kepada penciptaan keuntungan yang layak, sehingga memerlukan skala usaha yang ekonomis. Dalam kaitan pencapaian hal ini rangkaian kegiatan usaha pengelolaan dan pemasaran produk komoditi olahan menuntut skala tertentu untuk dapat hidup dan berkembang secara ekonomis. Skala ekonomis untuk kedua rangkaian agribisnis ini tentunya harus didukung oleh skala usaha produksi bahan mentah yang bersangkutan. Tentunya untuk berbagai jenis komoditi pertanian skala ekonomis dalam pengusahaannya melalui sistem agribisnis tidak sama. Salah satu kendala

pengembangan agribisnis berbagai komoditi pertanian selama ini adalah tidak tersedianya persediaan bahan mentah yang memadai dari segi jenis, mutu dan jangka waktunya untuk dapat mendukung industri pengolahan bahan mentah bersangkutan secara ekonomis. Melihat lahan pertanian sekarang ini sudah banyak terpecah-pecah menjadi lahan yang kecil-kecil, maka untuk mencapai skala ekonomis diperlukan konsolidasi usaha tani. Mengingat berbagai hal tersebut, maka kebijaksanaan perwilayahan komoditas perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan agribisnis satu atau lebih komoditas pertanian disuatu kawasan tertentu. Rangkuti (1992) berpendapat penentuan satu kawasan perwilayahan komoditas ini seharusnya berdasarkan penelitian dan pengkajian yang cermat antara lain segi:

- a. Kesesuaian daya dukung sumber daya alam (kondisi tanah secara keseluruhan, sumber air dan iklim) untuk komoditi pertanian bersangkutan;
- b. Potensi sumber daya manusia baik dari jumlah maupun kualitasnya yang ada dan perlu dikembangkan;
- c. Potensi sumber daya buatan yang ada dan yang dapat dikembangkan.

Penutup

Dalam bagian penutup akan ditarik beberapa simpulan dari penelaahan di atas, yaitu:

1. Krisis moneter dan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun drastis. Dengan adanya berbagai krisis tersebut, menandakan sektor pertanian yang kebanyakan berkaitan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi tahan terhadap krisis dan dapat sebagai motor penggerak pembangunan Indonesia.
2. Strategi pembangunan yang bertumpu kepada industri dengan teknologi tinggi, padat modal dan berbahan baku impor, ditambah lagi dikuasai para konglomerat yang mengandalkan fasilitas dan perlindungan dari pemerintah (budaya NKK), menyebabkan berbagai ketimpangan, ketidakadilan, ketidakefisienan dan lemahnya pondasi perekonomian nasional.

Untuk mengantisipasi perdagangan bebas (globalisasi) dan AFTA 2003, perlulah dikembangkan pembangunan pertanian dengan pola agribisnis yang masing-masing terdiri dari subsistem penyediaan sarana produksi, proses produksi yang menghasilkan produk pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran komoditi. Dalam merealisasikan hal ini perlu diambil langkah pemberdayaan sumber daya manusia agribisnis, bantuan kredit, diciptakan pola kemitraan, direalisasikan koperasi agribisnis, diaktifkannya litbang agribisnis dan kebijaksanaan lainnya yang kondusif. Hal ini perlu "political will" dari pihak Pemerintah, yang didukung oleh semua pihak terkait dengan mengutamakan kerja keras, keseriusan, kejujuran, disertai doa terus menerus kepada Tuhan YME.

Daftar Pustaka

- Abdoel Sjoekoer, 1998. "*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*", Jakarta: Pustaka Grafika.
- Bungaran Saragih. 1998. "*Strategi Pengembangan Pertanian Pasca Orde Baru*", dalam *Usahawan*, No.10/Th. XXVII. Mei 1997.
- Didin S.Damanhuri, 1999. "*Pilar-pilar Reformasi Ekonomi Politik*". Jakarta; CIDES.
- Erna Ernawati Chotim, 1996. "*Disharmoni Inti Plasma dalam Pola PIR*", Bandung; Akatiga.
- Fachrurrozie Sjarkowi, 1992. "*Agribisnis Kiat Perencanaan dan Pengelolaan di Tingkat Makro dan Mikro*", Palembang; Universitas Sriwijaya.
- Mahmud Thoha, 2001. "*Globalisasi, Krisis Ekonomi dan keberhngkitan Ekonomi Kerakyatan*", Penyunting. Jakarta; Pustaka Quantum.
- Purbayu BS. 1997. "*Produktivitas Lahan dan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Status Penguasaan Lahan pada Usahatani Padi (Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah)*", Bandung; UNPAD.
- _____, 2002. "*Pengembangan Agribisnis dalam Menuju kepada Ketahanan Perekonomian Indonesia*". Disampaikan pada Sarasehan Kebudayaan Tamansiswa XII, Yogyakarta, 5-6 Juli 2002.
- Pusat Penelitian Kerajinan Pembangunan Lemlit UNDIP dan BI Semarang. 1999. "*Identifikasi dan Pengembangan Komoditi Unggulan Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah*", Semarang; Lemlit UNDIP.
- _____. 2002. "*Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis*". Disampaikan pada sarasehan Kebudayaan Taman Siswa XII, Yogyakarta, 5-6 Juli 2002.
- Soeharsono Sagir. 1997. "*Kesiapan Agroindustri Indonesia Menjelang Era Perdagangan Bebas*". Dalam Prakarsa, Mei 1997.
- Soekartawi. 1997. "*Agribisnis Teori dan Aplikasinya*", Jakarta; Rajawali Pers.
- Soleh Soladin. 1998. "*Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Orde Baru*", dalam *Usahawan*, No. 10/Th. XXVII, Oktober 1998.

Lampiran

Andalan Produk Agribisnis Negara-negara Kawasan Asia.

Negara	Andalan Agribisnis
Indonesia	Kayu, Karet, Kopi, Minyak kelapa sawit
Malaysia	Minyak kelapa sawit, Kayu, Karet
Thailand	Produk Pertanian, Produk Perikanan
Philiphina	Minyak kelapa sawit, Pisang
Singapura	Karet dan Produknya, Jasa Pertanian
Cina	Jagung, Ulat Sutera
Jepang	Beras
Korea Selatan	Ikan
Taiwan	Bahan Makanan, Kayu lapis, Produk Kayu

Sumber: Diolah dari berbagai bahan dalam Bisnis Indonesia 14 November 1995

Beberapa Produk Unggulan Indonesia

Komoditas	Jangka Pendek		Jangka Panjang	
	Subtitusi Import	Promosi Ekspor	Subtitusi Import	Promosi Ekspor
I. Tanaman Pangan Hortikultura				
1. Padi	Beras	X	Beras	Beras Instan
2. Jagung	Biji Jagung Pakan Ternak Tepung	X	Biji Jagung Pakan Ternak	Minyak Jagung Etanol Tepung
3. Kedelai	Biji & Bungkil Kedelai Tahu Tempe Susu Kedelai Minyak Kedelai Kecap Tauco	X	Biji & Bungkil Kedelai Tahu Tempe Susu Kedelai Minyak Kedelai Kecap Tauco	Minyak Kedelai Tahu Tempe Kecap Susu Kedelai Tauco

4. Ubi Kayu	Tepung Tapioka Spiritus Alkohol Krupuk	X	Umbi Tepung Tapioka Spiritus Alkohol Krupuk	Tepung Tapioka Spiritus Alkohol Krupuk
5. Pisang	Buah Segar Keripik Sirup	Buah Segar Keripik Sirup	Buah Segar Keripik Sirup	Buah Segar Keripik Sirup Juice Jelly
6. Nanas	Buah Segar Soft Drink Buah Kaleng Sirup	Buah Segar Soft Drink Buah Kaleng Sirup	Buah Segar Soft Drink Buah Kaleng Sirup	Buah Segar Soft Drink Buah Kaleng Sirup
7. Mangga	Buah Segar Sirup Juice&Soft Drink	Buah Segar Sirup Juice	Buah Segar Sirup Juice	Buah Segar Sirup Juice

8. Bunga	Bunga Potong	Bunga Potong	Bunga Potong	<i>Essence oil</i> Bunga Potong
9. Rambutan	Buah Segar Buah Kaleng Juice Sirup	Buah Segar Buah Kaleng Juice Sirup	Buah Segar Buah Kaleng Juice Sirup	Buah Segar Buah Kaleng Juice Sirup
10. Cabai	Cabe Segar Saos Cabe Kering	Cabe Segar Saos Cabe Kering	Cabe Segar Saos Cabe Kering	Cabe Segar Saos Cabe Kering Minyak Cabe
11. Kentang	Kentang Segar Keripik Kentang Kering	Kentang Segar Keripik Kentang kering	Kentang Segar Keripik	Kentang Segar Keripik

II. Tanaman Perkebunan				
1. Kelapa Sawit	CPO Minyak Goreng Oleo Kimia Margarine Kosmetik	CPO	CPO Minyak Goreng Oleo Kimia Margarine Kosmetik Bio Diesel	CPO Minyak Goreng Oleo Kimia Margarine Kosmetik
2. Karet	Bahan Elektronik Ban Bahan Tekstil	Karet(lembaran) Ban	Bahan Elektronik Ban Bahan Tekstil	Bahan Elektronik Ban Bahan Tekstil
3. Kelapa	Kopra Kelapa Segar Minyak Kelapa Susu Kelapa Nata de Coco	Kopra Kelapa Segar Minyak Kelapa Susu Kelapa Nata de Coco	Kelapa Segar Kopra Minyak Kelapa Susu Kelapa Nata de Coco	Kelapa Segar Kopra Minyak Kelapa Susu Kelapa Nata de Coco

III. Perkebunan				
1. Ayam	DOC Daging Telur	X	DOC Daging Telur	DOC Daging Telur
2. Sapi	Daging Susu Kulit	X	Daging Susu Kulit	X

3. Kakao	Biji Kakao Permen Coklat	Biji Kakao Permen Coklat	Biji Kakao Permen Coklat	Biji Kakao Permen Coklat Coco Butter Coco Powder
4. Kopi	Biji Kopi Kopi Instan Permen	Biji Kopi Kopi Instan Permen	Biji Kopi Kopi Instan Permen	Biji Kopi Kopi Instan Permen
III. Perikanan				
1. Udang	Udang Segar	Udang Segar Udang Beku	Udang Segar Udang Beku	Udang Segar Udang Beku
2. Tuna	X	Tuna Segar Tuna Beku Tuna Kaleng	Tuna Segar Tuna Beku Tuna Kaleng	Tuna Segar Tuna Beku Tuna Kaleng
3. Ikan Karang	X	X	X	Ikan Hidup

Sumber: Didin S. Damanhuri, 1999, hal.297, 326 – 331.